

BAB II

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REGUGEES DALAM MENANGANI PERMASALAHAN PENGUNGS DI DUNIA

Permasalahan-permasalahan yang erat kaitannya dengan pengungsi di dunia menjadi tanggung jawab UNHCR selaku badan khusus yang dibentuk oleh PBB. Dalam bab kedua ini, penulis menjelaskan sejarah terbentuknya UNHCR serta tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain itu, penulis juga menjelaskan bagaimana eksistensi UNHCR di Italia dan kontribusi yang diberikan UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di dunia Internasional dengan memaparkan penerapan solusi berkelanjutan yang dilakukan oleh UNHCR diberbagai negara di dunia yaitu solusi repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan *resettlement*.

A. Sejarah Terbentuknya UNHCR

Dengan berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945 menyisakan korban sebanyak 50 juta orang yang kemudian menjadi pengungsi di beberapa wilayah seperti Eropa dan Afrika. Pada tahun 1947, Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) didirikan oleh PBB (Protection, 2005). IRO merupakan badan internasional pertama yang menangani semua aspek kehidupan pengungsi secara komprehensif. Sebelum IRO, Badan Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani semua permasalahan pengungsi, yang didirikan pada tahun 1944 untuk menangani jutaan orang yang mengungsi di Eropa sebagai akibat dari Perang Dunia II (Protection, 2005).

Pada akhir 1940-an, IRO telah banyak mendapat pertantangan dari dunia internasional, tetapi PBB sepakat bahwa IRO diperlukan sebagai sebuah badan untuk mengawasi masalah-masalah pengungsi secara global. Meskipun banyak perdebatan sengit di Majelis Umum, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi didirikan sebagai anak secara kelembagaan dari Majelis Umum yang tercantum pada Resolusi 319 (IV).

Namun, organisasi tersebut hanya dimaksudkan untuk beroperasi selama 3 tahun, hal ini disebabkan karena ketidaksepakatan banyak negara anggota PBB mengenai implikasi dari sebuah badan permanen (Protection, 2005).

Mandat atau ketetapan terhadap UNHCR pada awalnya ditetapkan dalam undang-undang, dilampirkan pada resolusi 428 (V) Majelis Umum PBB tahun 1950. Mandat ini kemudian diperluas dengan berbagai resolusi dari Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Pada resolusi 428 (V), dijelaskan bahwa mandat UNHCR adalah untuk menyediakan, atas dasar non-politik dan kemanusiaan terhadap perlindungan internasional bagi para pengungsi, serta untuk mencari solusi permanen bagi mereka (Protection, 2005).

Saat pertama kali dibentuk tahun 1951 UNHCR hanya memiliki 33 orang staf. Selanjutnya pada tahun 1953, UNHCR memiliki 11 kantor regional dengan jumlah staf meningkat menjadi 99 orang. Hingga saat ini UNHCR telah memiliki lebih dari 239 kantor regional di 138 negara di dunia dengan jumlah staf yang sudah mencapai kurang lebih 16.765 orang dari negara yang berbeda dan terbagi di kantor pusat dan kantor regional, serta markas besar UNHCR berada di Jenewa, Swiss (UNHCR, History of UNHCR, 2018). Kekuasaan yang dimiliki UNHCR pada awalnya bersifat sementara dan akan selalu diperbarui setiap lima tahun sekali oleh Majelis Umum PBB. Namun pada tahun 2003, kebijakan tersebut telah di hapus sehingga tidak ada batasan waktu dalam menangani pengungsi sampai permasalahan terkait pengungsi benar-benar terselesaikan. Setiap tahunnya UNHCR harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya didepan Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial (UNHCR, History of UNHCR, 2018).

Seiring berjalannya waktu, kapabilitas yang dimiliki UNHCR dalam menangani permasalahan korban Perang Dunia II semakin membaik, sehingga terjadi banyak perubahan didalam kewenangannya diantaranya;

- 1) Meningkatnya skala operasi UNHCR, yang mana ruang lingkup operasi utama UNHCR yaitu wilayah Eropa dan

diperluas hingga ke seluruh negara di dunia dengan cara mendirikan kantor perwakilannya di 120 negara.

- 2) Aktivitas utama UNHCR dari awal didirikan yaitu memberikan bantuan berupa fasilitas permukiman untuk pengungsi yang kemudian diperluas dengan aktivitas-aktivitas sosial seperti memberikan bantuan materi (pangan & papan), kesehatan, pendidikan serta membentuk program-program yang ditujukan untuk kelompok-kelompok khusus seperti kelompok anak-anak, remaja, orang tua, wanita, serta penyandang disabilitas yang mengalami trauma.
- 3) Terjadi peningkatan jumlah aktor internasional yang menjadi mitra UNHCR dalam memberikan bantuan bagi perlindungan pengungsi ataupun terhadap orang-orang yang terlantar.
- 4) Terjadi perluasan daerah yang awalnya UNHCR hanya bertugas di negara yang aman dan tidak memiliki pengaruh konflik, namun saat ini negara-negara yang kondisinya tidak stabil dan tidak kondusif turut serta menjadi perhatian UNHCR (UNHCR, (The UN Refugee Agency), 2018).

Sekitar akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, terjadi peningkatan terhadap intensitas konflik yang menimbulkan arus pengungsi secara besar-besaran. Contohnya pada konflik bersenjata antara Bosnia-Herzegovina, konflik bersenjata di Kosovo, konflik di Chechnya serta genosida yang terjadi di Rwanda menunjukkan bahwa dunia telah mengalami peningkatan intensitas konflik. Dari penjelasan tersebut diatas yang menyebabkan UNHCR mengalami perubahan dalam wewenangnya yang menjadi lebih luas dalam menangani pengungsi. Selama lebih dari 60 tahun berdiri, UNHCR telah berhasil membantu lebih dari 50 juta pengungsi dan UNHCR telah berhasil memperoleh Nobel Perdamaian pada tahun 1954 dan 1981 (Wulandari, 2016).

Statuta Komisariat Tinggi PBB tentang urusan pengungsi menjadi panduan UNHCR dalam menjalankan tugasnya supaya langkah yang dilakukan oleh UNHCR sejalan dengan kewenangan di dalam statuta. Berdasarkan Statuta Komisariat Tinggi PBB tentang urusan pengungsi ditegaskan bahwa tugas

yang diberikan kepada UNHCR adalah bersifat kemanusiaan, sosial, dan tidak bersifat politik. Adapun yang tertera dalam statuta tersebut telah disebutkan kategori pengungsi yang menjadi kewenangan UNHCR dalam menjalankan tugasnya yaitu;

- 1) Orang-orang yang termasuk dalam definisi pengungsi yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian yang di bentuk setelah terjadinya Perang Dunia I dan II serta Konstitusi Organisasi Internasional.
- 2) Orang-orang yang menjadi korban akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951, mengalami persekusi yang dilatarbelakangi oleh alasan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik, berada di luar dan tidak ingin memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya.
- 3) Orang lain yang berada di luar negara asalnya atau orang lain yang tidak memiliki kewarganegaraan dan memiliki kecemasan akan persekusi yang beralasan ras, agama, kebangsaan atau opini politik (UNHCR, (The UN Refugee Agency), 2018).

B. Fungsi dan Tugas UNHCR

Dalam Statuta Komisariat Tinggi PBB tentang urusan pengungsi, UNHCR memiliki fungsi sebagai badan khusus yang di bentuk untuk memberikan perlindungan secara internasional dan mencarikan solusi jangka panjang serta membentuk kerjasama dengan pemerintah, organisasi regional, ataupun aktor lainnya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan pengungsi (Wagiman, 2012). Dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya yaitu mencari solusi jangka panjang, hingga sejauh ini terdapat tiga solusi yang disediakan dan sering diupayakan oleh UNHCR untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, yaitu;

1. *Voluntary Repatriation* (Repatriasi Sukarela)

Repatriasi sukarela merupakan suatu proses dikembalikannya pengungsi ke negara asal. Proses ini bersifat

sukarela yang dapat diartikan tidak mengandung unsur paksaan supaya pengungsi dapat kembali ke negara asalnya. Pemulangan pengungsi ke negara asalnya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, namun juga secara hukum serta mendapat perlindungan nasional. UNHCR akan melakukan repatriasi atau suatu keadaan dimana kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. Hal ini dilakukan ketika situasi di negara asal pengungsi di nilai telah aman dan stabil paska konflik yang memungkinkan pengungsi untuk kembali dan mendapatkan kembali kehidupan yang disertai rasa aman. Ketika UNHCR telah berhasil mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, UNHCR masih harus terus memantau keadaan di negara asal pengungsi untuk memastikan keamanan para pengungsi. Jika terdapat indikasi ketidakamanan kembali yang dirasakan oleh pengungsi, maka UNHCR harus mengambil tindakan untuk turut andil dalam meredakan situasi di negara asal demi meringankan penderitaan pengungsi yang telah kembali ke negara asalnya. Dalam proses repatriasi, UNHCR sangat berperan dalam membantu pengungsi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat pengungsi untuk kembali ke negara asalnya. Dalam hal ini UNHCR bekerjasama dengan *International Organization Migration* (IOM) yang memfasilitasi kepulangan para pengungsi ke negara asal. Ketika kondisi negara asal belum memungkinkan pengungsi untuk kembali maka UNHCR tidak akan menjalankan solusi ini (UNHCR, *The UNHCR Resettlement Handbook*, 2018).

2. *Local Integration* (Integrasi Lokal)

Integrasi lokal merupakan proses permukiman pengungsi di negara pemberi suaka pertama. Keadaan dimana UNHCR tidak dapat melakukan repatriasi ataupun adanya ketidakinginan pengungsi untuk kembali ke negara asal karena alasan keamanan, maka solusi alternatif lainnya yang diberikan yaitu dengan integrasi lokal. Solusi ini biasanya diberikan kepada mereka yang telah lama menetap di negara suaka

pertama, dimana UNHCR membantu pengungsi agar dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dengan hak-hak yang nantinya mereka peroleh sama seperti hak yang dimiliki warga asli di negara suaka pertama secara permanen (UNHCR, The UNHCR Resettlement Handbook, 2018).

Integrasi lokal merupakan produk akhir dari proses dua arah yang dinamis dan beragam dengan tiga dimensi yang saling terkait. Pertama, integrasi lokal memiliki dimensi hukum. Negara penerima pengungsi memberikan pengungsi berbagai hak yang semakin luas dan sepadan dengan yang dinikmati oleh warga negaranya. Kemudian mereka memberi para pengungsi status hukum yang aman dan izin tinggal memungkinkan mereka untuk secara progresif menikmati hak yang sama dengan warga negara, termasuk akses yang setara ke lembaga-lembaga lokal, fasilitas dan layanan, serta penyatuan kembali keluarga di negara suaka. Hal ini dapat membantu menghindari marginalisasi dan penciptaan "warga negara kelas dua". Untuk bagian para pengungsi, mereka diharapkan memenuhi kewajiban mereka terhadap negara sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, proses hukum harus mengarah pada hak tempat tinggal permanen dan kemungkinan memperoleh kewarganegaraan. Konvensi 1951, sebagaimana dilengkapi oleh hukum hak asasi manusia internasional, menetapkan hak dan standar minimum untuk perlakuan terhadap pengungsi, yang juga diarahkan untuk proses integrasi. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara penerima akan; sejauh mungkin; memfasilitasi integrasi para pengungsi (PROGRAMME, 2012).

Pasal 34 Konvensi 1951 menetapkan bahwa Negara-negara harus melakukan segala upaya untuk mempercepat proses naturalisasi bagi para pengungsi dan mengurangi biaya. Banyak negara telah meratifikasi pasal ini ke dalam undang-undang nasional mereka dengan mengurangi masa tunggu dan biaya naturalisasi, serta menghilangkan persyaratan untuk penolakan kewarganegaraan negara asal. Naturalisasi ini menyimpulkan dimensi hukum dari proses integrasi karena

pengungsi tidak lagi menjadi pengungsi sesuai dengan Pasal 1C (3) Konvensi 1951 (PROGRAMME, 2012).

Integrasi lokal juga memiliki dimensi ekonomi di mana individu, rumah tangga atau keluarga, dan masyarakat dimungkinkan untuk menjadi kurang bergantung pada bantuan kemanusiaan dan semakin menjadi kontributor mandiri bagi ekonomi lokal. Untuk bagian para pengungsi, mereka diharapkan dapat secara aktif memaksimalkan peluang ekonomi yang tersedia sehingga dapat berkontribusi penuh kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Perlu diakui bahwa beberapa pengungsi mungkin merasa sulit untuk berintegrasi secara ekonomi karena berbagai alasan, termasuk masalah medis, kerentanan lain dan lingkungan sosial-ekonomi dan budaya yang sulit. Dalam situasi seperti itu, upaya khusus mungkin diperlukan untuk memfasilitasi integrasi mereka (PROGRAMME, 2012).

Selanjutnya, integrasi memiliki dimensi sosial dan budaya. Pengungsi memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya teliti untuk "menyesuaikan diri" dengan lingkungan lokal dan menghormati serta memahami budaya dan gaya hidup baru, dengan mempertimbangkan nilai-nilai populasi lokal. Untuk bagian para pengungsi, komunitas tuan rumah atau pemilik suaka memiliki tanggung jawab untuk "mengakomodasi" para pengungsi ke dalam struktur sosial-budaya. Menyadari banyaknya manfaat keragaman, anggota masyarakat negara suaka harus dibantu untuk belajar memahami latar belakang dan keadaan pengungsi, menentang diskriminasi, eksploitasi, hingga *xenofobia* serta melakukan upaya untuk mendukung kontribusi pengungsi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi negara suaka. Kohesi sosial dan ekonomi antara komunitas tuan rumah atau negara pemberi suaka dan para pengungsi kemungkinan akan terhambat jika lingkungan di sekitarnya bersifat diskriminatif dan tidak dapat menerima daripada memungkinkan dan jika perbedaan antara masyarakat tuan rumah dan para pengungsi ditakuti dan dibenci daripada dihargai (PROGRAMME, 2012).

Integrasi lokal dapat disimpulkan merupakan proses yang kompleks dan bertahap dengan berbagai dimensi yang

berbeda tetapi saling terkait. Integrasi lokal bukan proses yang homogen, bahkan di antara individu dengan latar belakang yang serupa. Latar belakang dari populasi pengungsi, negara penerima suaka, kemampuan keuangan negara tuan rumah atau penerima suaka serta kemauan politik pemerintah penerima suaka untuk menyediakan dasar hukum dan kelembagaan bagi integrasi lokal semua hal tersebut memengaruhi bagaimana dan seberapa cepat pengungsi dapat menjadi sepenuhnya dan dapat terintegrasi dengan baik. Meskipun demikian, sejarah dan asal usul populasi yang beragam di dunia menunjukkan bahwa memang mungkin bagi orang untuk mengintegrasikan sepenuhnya ke dalam komunitas dan budaya baru dan bahwa pengungsi yang diizinkan dan dimungkinkan untuk berintegrasi dengan baik dapat mewakili sumber daya yang berharga dan menjadikannya positif, bahkan secara internasional diakui, kontribusi ke negara tuan rumah atau negara penerima suaka (PROGRAMME, 2012).

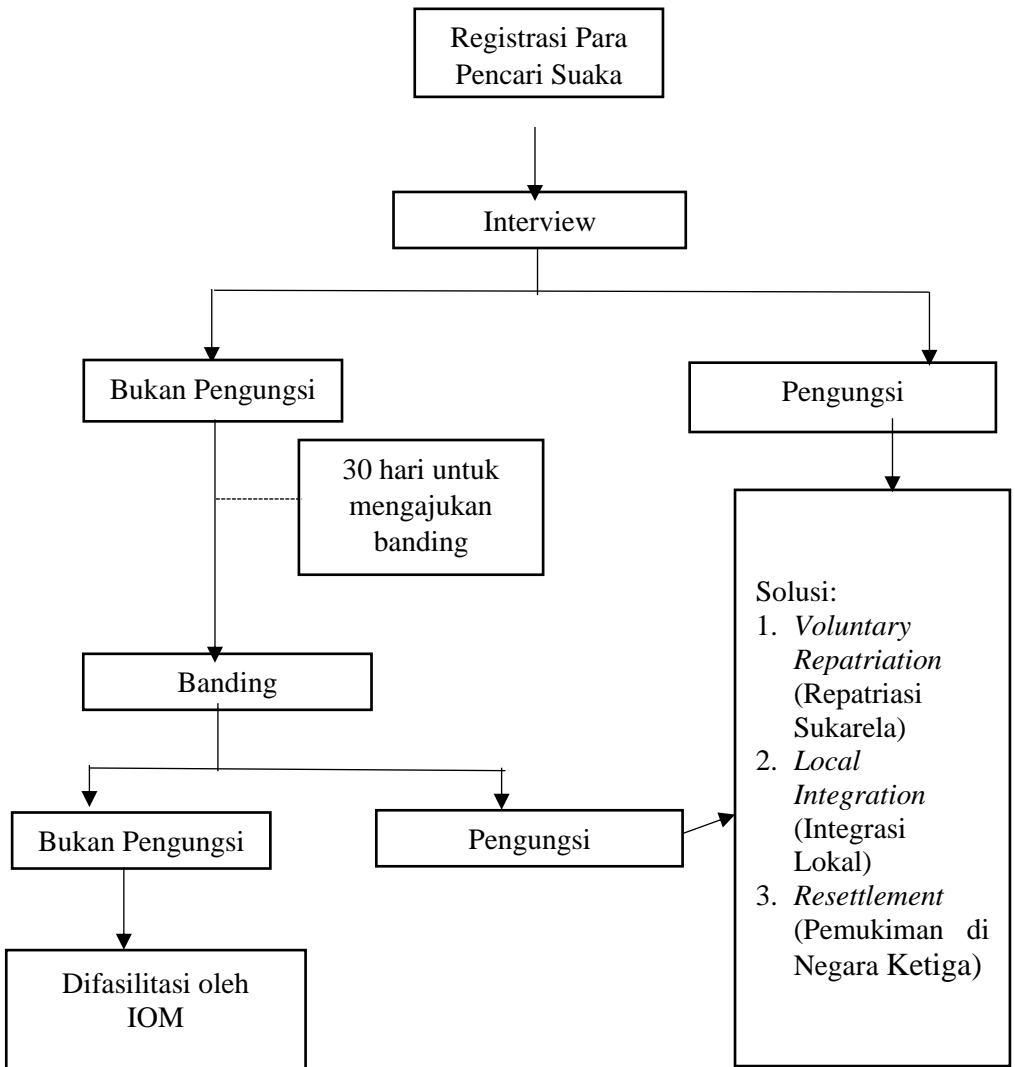
3. *Resettlement* (Pemukiman di Negara Ketiga)

Resettlement merupakan salah satu upaya yang dilakukan UNHCR supaya para pengungsi mendapatkan tempat tinggal secara permanen dan juga mendapatkan perlindungan serta hak-hak yang diperoleh lebih luas dibandingkan dengan hak yang di terima saat berada di negara suaka pertama. UNHCR juga bekerjasama dengan IOM dalam pelaksanaan solusi ini dan di bantu oleh beberapa organisasi-organisasi terkait yang secara sukarela ikut membantu menangani pengungsi. Secara tidak langsung, *resettlement* ini menjadi tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, diantaranya seperti Amerika, Australia, Kanada, Belanda, Jerman, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Prancis, dan juga Italia yang mana negara-negara tersebut menjadi negara ketiga yang di tuju oleh para pengungsi pada umumnya. Maka dari itu, UNHCR terus mengupayakan kerjasama dengan pemerintah negara ketiga untuk kesediaannya dalam memberikan kemudahan prosedur

penerimaan pengungsi serta permukiman yang layak untuk para pengungsi. Hal ini dikarenakan penentuan serta alokasi kuota *resettlement* bukanlah tugas UNHCR dan juga bukan hak pengungsi, melainkan hak bagi negara penerima sehingga solusi terakhir ini memakan waktu yang sangat lama (Secretariat, 2017).

Bagi para pengungsi yang datang ke negara suaka pertama, mereka harus terlebih dahulu menjalani proses *Refugee Status Determination* (RSD) yang termasuk salah satu tugas utama UNHCR ketika mendapati pengungsi yang masuk ke suatu negara. Proses ini merupakan salah satu cara agar pengungsi mendapatkan perlindungan secara internasional dari UNHCR. Berikut adalah alur proses RSD:

Gambar 2.1 : Proses *Refugee Status Determination*



Sumber : (Wulandari, 2016)

Setiap pengungsi ataupun pencari suaka yang masuk ke suatu negara wajib melaporkan dirinya ke UNHCR dengan membawa dokumen-dokumen pribadi yang selanjutnya akan di data oleh UNHCR. Setelah itu, UNHCR akan melakukan wawancara dan pengungsi atau pencari suaka harus menjelaskan alasan mengapa mereka meninggalkan negara asalnya dengan jujur. Setelah proses RSD selesai, maka pengungsi akan memperoleh sertifikat pertanda mereka adalah pengungsi yang di beri oleh UNHCR, setelah itu mereka harus menunggu solusi yang akan diberikan oleh UNHCR untuk para pengungsi tersebut. Bagi mereka yang gagal mendapatkan status sebagai pengungsi bisa mengajukan banding dalam waktu 30 hari. UNHCR memiliki kewenangan untuk membatalkan status mereka sebagai pengungsi apabila didapati terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum yang dilakukan oleh pengungsi (Manik, 2013).

Disamping itu, UNHCR juga memiliki solusi jangka pendek berupa bantuan langsung (*assistance*) yang terdiri dari kebutuhan pangan, papan, air, sanitasi, dan kesehatan yang didistribusikan melalui *camp* penampungan sementara yang di kelola oleh UNHCR. Selain itu dalam menjalankan fungsinya, UNHCR tidak dapat bergerak sendiri. Sehingga agar fungsi tersebut dapat berjalan sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 428 (V) dibutuhkan kerjasama antara negara-negara di dunia bersama UNHCR seperti:

- 1) Ikut serta melibatkan negaranya di setiap konvensi internasional dan turut mengimplementasikannya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi;
- 2) Menciptakan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan melalui pembentukan perjanjian yang sifatnya khusus;
- 3) Tidak menelantarkan pengungsi yang tidak mampu secara finansial;
- 4) Ikut serta dalam mempromosikan repatriasi sukarela;
- 5) Mempromosikan pembauran melalui fasilitas naturalisasi;

- 6) Memudahkan pemberian dokumen perjalanan dan dokumen lainnya yang memungkinkan permukiman kembali para pengungsi;
- 7) Memberikan izin kepada pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk keperluan permukiman kembali,
- 8) Memberikan informasi kepada UNHCR yang berkaitan dengan jumlah dan kondisi pengungsi beserta hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengungsi (UNHCR, Commentary on The Refugee Convention 1951, p.g 27-28., 1997).

C. Kontribusi UNHCR dalam Menangani Pengungsi di Dunia Internasional

1. UNHCR di Suriah

Menurut laporan resmi dari laman UNHCR, sekitar jutaan lebih masyarakat Suriah telah melarikan diri melintasi perbatasan karena mereka melarikan diri dari bom dan peluru yang menghancurkan rumah mereka. Turki menampung jumlah terbesar pengungsi Suriah yang terdaftar kurang lebih 3,3 juta masyarakat Suriah. Sebagian besar pengungsi Suriah di negara-negara tetangga tinggal di daerah perkotaan, dengan hanya sekitar 8 persen yang ditampung di kamp-kamp pengungsi (UNHCR, Syria emergency, 2018).

Pengungsi Suriah yang berada di Lebanon juga sangat berjuang untuk bertahan hidup dikarenakan memiliki sedikit atau tidak memiliki sumber keuangan sama sekali, dan sekitar 70 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak ada kamp pengungsi formal dan akibatnya masyarakat Suriah tersebar di lebih dari 2.100 komunitas dan lokasi perkotaan dan pedesaan dan sering berbagi penginapan kecil dengan keluarga pengungsi lain dalam kondisi penuh sesak (UNHCR, Syria emergency, 2018).

UNHCR pun menyediakan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa bagi para pengungsi Suriah, membantu mereka yang paling rentan dengan uang tunai untuk obat-obatan dan makanan, kompor dan bahan bakar untuk pemanas, isolasi

tenda, selimut termal dan pakaian musim dingin. Bagi mereka yang telah mengungsi tetapi tetap di Suriah, UNHCR menyediakan perlengkapan tempat tinggal dan barang-barang non-makanan serta layanan perlindungan dan dukungan psikososial (UNHCR, Syria emergency, 2018).

Pada awal 2017, dengan perang Suriah memasuki tahun ketujuh dan tanpa akhir pertempuran yang terlihat, UNHCR bergabung dengan badan-badan kemanusiaan dan pembangunan PBB lainnya untuk memohon US \$ 8 miliar dalam pendanaan baru yang vital untuk membantu jutaan masyarakat di Suriah dan di seluruh wilayah. Aspek pertama dari banding yang dilakukan UNHCR adalah Rencana Pengungsi dan Ketahanan Daerah (3RP) untuk 2018-2019. Dipimpin oleh UNHCR, diperlukan US \$ 4,4 miliar untuk mendukung lebih dari 5 juta pengungsi di negara-negara tetangga dan sekitar empat juta orang di komunitas yang menampung mereka. Aspek kedua adalah Rencana Respon Kemanusiaan Suriah pada tahun 2017, yang mencari hampir US \$ 3,2 miliar untuk memberikan dukungan dan perlindungan kemanusiaan kepada 13,5 juta orang di dalam wilayah Suriah (UNHCR, Syria emergency, 2018).

2. UNHCR di Venezuela

Pada laman resmi UNHCR telah mencatat bahwa Venezuela menampung ribuan pengungsi dari wilayah tersebut dan bagian lain dunia. Namun dewasa ini jumlah rakyat Venezuela yang dipaksa meninggalkan rumah mereka terus meningkat, dan sejumlah besar dari mereka membutuhkan perlindungan internasional. Lebih dari 4 juta rakyat Venezuela telah meninggalkan negara mereka hingga saat ini, menurut data dari pemerintah yang menerimanya, menjadikan ini salah satu krisis pemindahan terbesar di dunia baru-baru ini (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

Sejak 2014, telah terjadi peningkatan 8.000 orang dalam jumlah masyarakat Venezuela yang mencari status pengungsi di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Banyak rakyat Venezuela yang memenuhi kriteria tidak

mendaftar untuk prosedur pengungsi dan sebaliknya memilih bentuk-bentuk tinggal legal alternatif, yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan dan memungkinkan akses ke pekerjaan, pendidikan dan layanan sosial. Namun, ratusan ribu rakyat Venezuela tetap tanpa dokumen atau izin untuk tinggal secara teratur di negara-negara terdekat, dan karenanya tidak memiliki jaminan akses ke hak-hak dasar. Hal ini yang membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan seksual, perdagangan manusia, kekerasan, diskriminasi dan bahkan *xenophobia* (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

Mayoritas pengungsi dan migran dari Venezuela yang tiba di negara-negara tetangga adalah keluarga dengan anak-anak, wanita hamil, orang tua dan orang-orang berkebutuhan khusus. Seringkali mereka diwajibkan untuk mengambil rute tidak teratur untuk mencapai keselamatan, mereka mungkin menjadi mangsa penyelundup, pedagang manusia, dan kelompok bersenjata tidak teratur. Semakin banyak keluarga yang datang dengan sumber daya yang semakin sedikit, mereka sangat membutuhkan dokumen-dokumen resmi, perlindungan, tempat tinggal, makanan dan obat-obatan (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

Negara-negara tuan rumah dan masyarakat di Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Meksiko, Panama, Peru, dan Karibia bagian selatan telah dengan murah hati menyambut mereka, tetapi semakin kewalahan dan beberapa orang mencapai titik jenuh. Di seluruh wilayah, UNHCR telah meningkatkan responsnya dan bekerjasama dengan pemerintah dan mitra tuan rumah, khususnya IOM, untuk mendukung pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif untuk kebutuhan pengungsi dan migran dari Venezuela. Secara konkret, UNHCR mengumpulkan data untuk lebih memahami kebutuhan spesifik rakyat Venezuela; mendukung Negara-negara untuk meningkatkan kondisi penerimaan, memfasilitasikan penyediaan informasi, memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar langsung Venezuela termasuk tempat tinggal, dan memerangi diskriminasi dan *xenophobia* melalui kampanye

kesadaran tentang menjaga dan melindungi pengungsi Venezuela (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

UNHCR telah memperkuat kehadiran mereka di sepanjang perbatasan utama untuk membatasi sejauh mungkin risiko, khususnya yang berkaitan dengan akses ke wilayah, perdagangan manusia, eksploitasi, dan untuk mengidentifikasi orang-orang yang mungkin memerlukan perlindungan dan layanan khusus, seperti anak-anak yang tidak didampingi dan dipisahkan dan wanita hamil. UNHCR juga memberikan dukungan dan orientasi hukum pada saat kedatangan dan mendistribusikan air minum, dan perlengkapan kebersihan untuk wanita dan anak-anak di daerah perbatasan. Tim UNHCR juga memberikan bantuan uang tunai kepada Venezuela yang paling rentan. UNHCR juga mendukung upaya pendaftaran pemerintah di Aruba, Brasil, Kolombia, Curacao, Ekuador, Guyana, Peru dan Trinidad dan Tobago. Di Peru, permintaan suaka dari Venezuela telah meningkat lebih dari lima kali lipat, dari 33.100 pada 2017 menjadi 190.500 pada 2018. Di Brasil, 61.600 klaim suaka diajukan, naik dari 17.900 yang dilaporkan pada 2017 (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

UNHCR melengkapi upaya pemerintah untuk menyediakan tempat penampungan darurat bagi warga Venezuela yang tiba di negara-negara perbatasan dan kota-kota utama. Di Brasil, UNHCR menyediakan perencanaan lokasi, tenda, barang-barang bantuan, air mancur minum, pendaftaran melalui biometrik, mobilisasi masyarakat, penyebaran informasi, dan manajemen lokasi. Sejauh ini, 13 tempat penampungan sementara telah dibuka di Boa Vista dan Pacaraima, menampung lebih dari 6.000 warga Venezuela. Di Maicao, Kolombia, sebuah pusat penerimaan sementara dibuka pada Maret 2019, didirikan atas permintaan otoritas nasional dan lokal, dengan kapasitas awal untuk menampung 350 orang (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

UNHCR juga telah memasang ruang dan ruang yang ramah anak untuk ibu menyusui di titik-titik persimpangan dan sedang mengadvokasi dengan pemerintah tuan rumah untuk memfasilitasi akses ke pendidikan bagi anak-anak Venezuela. UNHCR telah membangun jaringan relawan untuk

meningkatkan hubungan UNHCR dengan masyarakat dan memastikan komunikasi dua arah dan akuntabilitas, sambil bekerja dengan berbagai kelompok populasi, termasuk wanita, anak-anak, orang tua, dan orang berkebutuhan khusus, serta kelompok masyarakat adat, dan LGBTI . Selain itu, UNHCR sedang berkoordinasi dengan para mitra tentang pembentukan prakarsa Ruang Dukungan regional untuk memastikan bahwa para pengungsi dan migran menerima informasi terbaru dan dapat diandalkan serta paket layanan minimum di lokasi-lokasi utama di seluruh wilayah (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

Untuk mempromosikan integrasi para pengungsi dan migran dalam komunitas tuan rumah mereka, UNHCR bekerjasama dengan pihak berwenang setempat dan sektor swasta dan mendukung penyediaan pelatihan kejuruan untuk rakyat Venezuela. UNHCR juga mendukung relokasi pengungsi dan migran Venezuela di negara bagian Roraima Brasil ke bagian lain negara itu di mana ada lebih banyak peluang kerja dan layanan. Dalam upaya untuk mengekang *xenophobia* terhadap Venezuela dan mempromosikan solidaritas; UNHCR dalam koordinasi dengan mitra-mitra terkait, telah meluncurkan beberapa kampanye di Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Panama, dan Peru (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

Bantuan kemanusiaan, serta peningkatan dukungan untuk inklusi sosial-ekonomi, segera ditingkatkan untuk melengkapi upaya pemerintah dan memastikan masyarakat terus menerima pengungsi dan migran di lingkungan yang aman dan ramah. Untuk memastikan respon menyeluruh PBB yang luas, dan untuk mendukung upaya pemerintah penerima utama, *Platform* atau wadah Koordinasi Antar-Lembaga Regional untuk situasi Venezuela - yang dipimpin oleh UNHCR dan IOM - meluncurkan Rencana Respon Regional untuk Pengungsi dan Migran (RMRP) dari Venezuela pada tanggal 14 Desember 2018. Rencana tersebut, dikembangkan dengan sekitar 95 mitra yang bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan lebih dari 2,2 juta pengungsi dan migran dari Venezuela serta diperkirakan setengah juta anggota masyarakat tuan rumah. Hal ini adalah

yang pertama dari jenisnya di Amerika: cetak biru strategis dan operasional, template koordinasi, dan mekanisme pendanaan untuk menanggapi kebutuhan Venezuela saat bepergian (UNHCR, Venezuela Emergency, 2018).

3. UNHCR di Yaman

Perang yang terjadi Yaman, yang telah membuat Yaman menjadi salah satu negara termiskin di Timur Tengah, telah memperparah kebutuhan yang timbul dari kemiskinan dan ketidakamanan selama bertahun-tahun. Kekerasan yang memburuk telah mengganggu jutaan nyawa sehingga mengakibatkan banyak korban dan pemindahan besar-besaran, dan situasinya memburuk dengan cepat. Masyarakat sipil menanggung beban terbesar dari krisis, dengan 22,2 juta warga Yaman kini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka sangat berisiko. Sekitar 2 juta orang sekarang menderita dalam kondisi putus asa, jauh dari rumah dan kehilangan kebutuhan dasar. Situasinya sangat mengerikan sehingga hampir 1 juta pengungsi Yaman kehilangan harapan dan berusaha untuk pulang, meskipun belum aman. Dari penjelasan tersebut diatas, telah jelas bahwa Yaman menghadapi bencana kemanusiaan. Tanpa bantuan, lebih banyak nyawa akan hilang karena kekerasan, penyakit yang dapat diobati atau kekurangan makanan, air dan tempat tinggal (UNCHR, 2018).

UNHCR menyediakan bantuan yang menyelamatkan jiwa bagi pengungsi Yaman, serta bagi para pengungsi dan pencari suaka. Di bawah sistem koordinasi kemanusiaan di Yaman, UNHCR memimpin dalam penyediaan barang-barang perlindungan, tempat tinggal dan non-makanan. UNHCR menyediakan tempat penampungan darurat, kasur, selimut, alas tidur, peralatan dapur, ember, dan lainnya untuk membantu mereka yang terlantar dan paling rentan. Bantuan UNHCR telah menjangkau orang-orang yang membutuhkan di ke-20 gubernur yang terkena dampak konflik. UNHCR juga membantu keluarga memperbaiki rumah yang rusak akibat konflik, dan

UNHCR memperbarui bangunan umum dan permukiman yang sekarang menampung keluarga-keluarga yang kehilangan tempat tinggal. UNHCR mendukung fasilitas kesehatan yang melayani pengungsi, pencari suaka, dan Yaman yang terkena dampak kekerasan, dan UNHCR bekerja untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran kolera, yang telah muncul sebagai akibat dari konflik. UNHCR menyediakan bantuan hukum dan keuangan serta layanan dukungan psiko-sosial untuk membantu mereka yang terkena dampak perang. UNHCR juga terus melindungi dan mendukung lebih dari 280.000 pengungsi dan pencari suaka, terutama dari Tanduk Afrika, yang tetap berada di Yaman meskipun ada konflik dan khususnya berisiko. Namun, dana yang terbatas untuk pekerjaan UNHCR di Yaman - saat ini hanya 3 persen - berarti UNHCR tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan besar ini, membatasi kapasitas UNHCR untuk memberikan bantuan penyelamatan jiwa (UNCHR, 2018).

Dari penjelasan bab ini dapat kita pahami bahwa UNHCR merupakan lembaga khusus yang di bentuk PBB untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Eksistensi UNHCR di beberapa negara didunia muncul pertama kali akibat derasnya arus pengungsi yang datang ke negara-negara tersebut dan UNHCR masih berkontribusi di negara-negara tersebut sampai saat ini dengan targetnya menyelesaikan permasalahan pengungsi yang ada melalui peran-peran dari UNHCR. Namun apakah peran-peran dari UNHCR dapat berhasil seperti negara-negara yang telah dipaparkan diatas? Maka dari itu, pada bab selanjutnya penulis akan membahas tentang apakah terdapat undang-undang ataupun kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Italia dalam menghadapi permasalahan pengungsi Libya.